

Optimalisasi Pengelolaan Bumdes melalui Pembukuan Keuangan di Desa Karang Sari

Zaini Muchlis¹, Romi Bhakti Hartarto²

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183. (0274)-387656

e-mail: Zaini.muchlis@umy.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183. (0274)-387656

e-mail: Romi.hartarto@umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.54.982>

Abstrak

BUMDes selaku lembaga keuangan desa memiliki tuntutan dalam memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh para pelaku usaha ekonomi desa. Dalam hal ini ia wajib membuat sebuah laporan keuangan seluruh unit usaha desa secara transparan dan penuh kejujuran setiap bulannya. Secara umum pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan lembaga lainnya, dimana pengurus harus melakukan pencatatan secara sistematis dari seluruh aktifitas transaksi yang dilakukan setiap hari. BUMDes Karang Sari yang terletak di Kecamatan Pejawaran menjadi salah satu lembaga desa yang harus melakukan laporan tersebut. Pengurus baru dalam menjalankan tugasnya masih banyak kekurangan, baik pengetahuan tentang pembukuan yang kurang dikuasai, ataupun belum memahami jobdesk yang diembannya. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terhadap transparansi keuangan di desa tersebut tidak optimal dan berdampak negatif pada para pengelolanya serta menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan perangkat desa. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan juga pendampingan dalam menjalankan proses pembukuan keuangan di instansi tersebut. Melalui pengabdian masyarakat ini kami memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap proses pembukuan keuangan yang mudah dan transparan kepada para pengelola BUMDes Karang Sari. Metode pelaksanaan pengabdian ini melalui kerjasama bersama BUMDes dan beberapa perangkat desa melalui tahap sosialisasi, kemudian memberikan pelatihan terkait tata cara pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Tahap selanjutnya yaitu evaluasi yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian terhadap masyarakat akan berjalannya program ini. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan pembukuan yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan Unit Usaha BUMDes bagi pengelola/pelaksana operasional BUMDes Karang Sari.

Kata kunci: Pembukuan Keuangan, BUMDes Karang Sari, Pejawaran

Abstract

BUMDes as a village financial institution has demands that must be met for the needs of micro-scale businesses run by village economic business actors. In this case he is obliged to make a financial report of all village business units in a transparent and honest manner every month. In general, BUMDes financial bookkeeping is no different from other institutions, where the management must systematically record all transaction activities carried out every day. BUMDes Karang Sari, which is located in Pejawaran sub-district, is one of the village institutions that must carry out the report, where the administrators who are relatively new in carrying out their duties still have many shortcomings, either knowledge about bookkeeping that he lacks control, or does not understand the job desk he carries. So that it makes the service to the community not optimal for financial transparency that revolves in the village and has a negative impact on its managers which ultimately causes public distrust of BUMDes and village officials. So that there is a need for training and also assistance in carrying out the financial accounting process at the agency. Through this community service, we provide solutions to these problems by providing training and assistance in an easy and transparent financial accounting process for the administrators of BUMDes Karang Sari. The method of implementing this service is through collaboration with BUMDes and several village officials through the socialization stage, then providing training related to financial bookkeeping procedures in accordance with financial accounting standards (SAK). The next stage is an evaluation that will be carried out by the community service team for the running of this program. The result of this community service is an increase in knowledge of bookkeeping, namely the recording and financial reporting of the BUMDes Business Unit for the administrators or the operator of the Karang Sari BUMDes.

Keyword: Financial Bookkeeping, Karang Sari BUMDes, Pejawaran

Pendahuluan

Desa seringkali identik dengan keterbelakangan pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, tradisi dan masyarakat yang relatif kolot serta tradisionalis [1]. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah upaya dalam melakukan pengembangan pembangunan desa secara intensif guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Salah satu langkah dalam memajukan desa adalah dengan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes inilah yang menjadi upaya untuk memperkuat perekonomian yang ada di desa dengan mengelola potensi-potensi desa dan masyarakatnya yang bisa menghadirkan keuntungan bagi masyarakat desa itu sendiri. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan mampu mengelola seluruh keuangan yang berputar di desa melalui

pengelolaan berbagai unit-unit usaha sesuai dengan potensi desa. Pengelolaan yang professional dari berbagai unit usaha tersebut maka BUMDes akan dapat menghasilkan keuntungan (profit). Sebagian keuntungan BUMDes akan dibagikan secara merata kepada desa dan kembali kepada masyarakat. Modal BUMDes sebagian besar tentunya berasal dari Desa, sehingga dalam pengelolaan BUMDes harus berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, emansipatif, partisipatif, transparansi dan akuntabel [2]. Salah satu kunci keberhasilan dalam mengelola suatu usaha adalah adanya kejujuran pihak pengelola serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakatnya, hal tersebut dapat dibuktikan melalui sebuah transparansi dalam pembukuan pelaporannya yaitu pencatatan dan laporan keuangan yang rapi untuk setiap kegiatan yang dijalankan unit usaha BUMDes. Mayoritas bisnis yang sehat dan berkembang adalah mereka yang rapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dalam hal apapun. Tentunya karena BUMDes ini adalah bisnis, pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan adalah hal yang terpenting [3].

Sebagai badan usaha milik desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*), BUMDes harus memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, serta wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha yang dikelolanya setiap bulan dengan jujur dan transparan. Pengelolaan BUMDes Karangasari dalam merekap seluruh laporan yang diterima dari seluruh mitranya saat ini masih dilakukan secara manual, dan masih banyak sekali kekurangannya. Sering kali pengelola mendapatkan complain dari masyarakat dikarenakan lambatnya kinerja yang dilakukan oleh pengurus dalam memberikan laporan keuangannya. Taraf pendidikan masyarakat awam yang hidup di pedesaan menjadi salah satu faktor lemahnya ilmu pengetahuan mereka dalam mengelola sebuah badan usaha. Sehingga sangatlah sulit mengembangkan sebuah badan usaha yang ada di desa tersebut, kecuali dengan adanya sebuah pelatihan dan pendampingan yang masif dalam pelaksanaannya. Proses ini sangatlah penting dalam membantu memajukan BUMDes melalui pengembangan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK tersebut dapat dilihat pada gambar 1 & 2 pada dokumentasi berikut:



Gambar 1: Dokumentasi pelatihan pembukuan keuangan terhadap pengelola BUMDes



Gambar 2: Dokumentasi setelah pelatihan pembukuan keuangan

Banyak hal yang menjadi kendala bagi masyarakat desa karangsari dalam memajukan BUMDes yang baru saja terbentuk dalam beberapa bulan terakhir ini. Permasalahan tersebut muncul di berbagai devisa yang dibentuknya dalam mengelola unit unit usaha desa. Salah satu permasalahan yang terjadi pada BUMDes ini adalah kurangnya pengetahuan pihak pengurus dalam mengelola

kas keuangan desa yang menjadi arus keluar masuknya dana yang ada pada desa tersebut, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pengurus dan juga perangkat desa dalam mengelola BUMDes Karang Sari. Tentu hal tersebut dapat menghambat kemajuan desa dalam mengelola berbagai macam unit usaha yang menjadi potensi desa tersebut. Menjadi hal yang sangat penting dalam memajukan potensi desa adalah adanya sebuah pembinaan dan peningkatan ilmu pengetahuan terhadap masyarakatnya dalam mengelola sebuah lembaga desa. Dan pembinaan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam pelatihan, pendampingan dan juga kontrol melalui evaluasi-evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan terhadap tata kelola BUMDes. Sumber daya manusia yang mengerti tentang pengelolaan BUMDes menjadi kunci atas kemajuan desa Karang Sari, tanpa adanya tata kelola yang baik tentu segala hal yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik.

Untuk menjawab problematika di atas, maka pengabdian melakukan pengabdian dengan tujuan mengoptimalkan kinerja BUMDes Karang Sari dengan konsep pelatihan pembukuan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yaitu dengan memberikan materi pelatihan yang meliputi sistem akuntansi, persamaan dasar akuntansi, buku besar, buku pembantu dan juga laporan keuangan. Dengan standar ini pengelola dapat memberikan laporan keuangan yang beredar di desa secara transparan dan penuh tanggung jawab. Strategi ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang melanda sebagian pengelola BUMDes Karang Sari dalam menjalankan tugas amanah yang diembannya serta meningkatkan profesionalitas kinerjanya, sebab sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya menjadi kunci keberhasilan sebuah program dan kinerja yang dijalankan dalam sebuah lembaga.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat adalah bersifat kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, wawancara dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait [4]. Setelah itu, pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Adapun metode pelaksanaan pengabdian dibagi dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahapan pertama

Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi detail dari lapangan pengabdian sehingga pengabdian ini benar-benar bisa menyelesaikan problem di masyarakat, yaitu:

a. Metode Observasi

Pada metode observasi, pengabdian melakukan survey ke lapangan dengan melihat lokasi pengabdian dan berkunjung ke BUMDes desa Karang Sari kecamatan Pejawaran. Observasi ini sangat bermanfaat karena pengabdian akan mendapatkan gambaran tentang lokasi pengabdian dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap harinya.

b. Metode Wawancara

Pada metode wawancara ini, pengabdian mengadakan pertemuan bersama jajaran struktural pengurus desa, pengelola BUMDes dan beberapa perwakilan dari masyarakat serta menanyakan problematika dan persoalan yang dihadapi masyarakat tentang berbagai macam kekurangan terkait permasalahan yang dihadapi dalam mengelola BUMDes. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang benar sehingga dapat dilakukan pengabdian sesuai problem yang dihadapi masyarakat.

c. Metode penelusuran dokumen

Pada tahapan ini, pengabdian melakukan penelusuran terkait tahapan tahapan serta tata cara pengelolaan BUMDes Karang Sari yang telah berjalan sampai saat ini agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Tahapan kedua

Pada tahapan kedua ini, dilakukan tahapan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu:

- a. Sosialisasi terhadap segenap warga yang memiliki unit-unit usaha terhadap pentingnya pengelolaan pembukuan kas yang transparan dan akuntabel pada BUMDes Karang Sari. Hal tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan segenap jajaran struktural desa.
- b. Kerjasama terhadap BUMDes Karang Sari dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes yang profesional.
- c. Pembuatan buku keuangan kas dan template laporan keuangan/ informasi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada BUMDes Karang Sari
- d. Pelatihan dan praktik pengelolaan kas dan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang sesuai standar akuntansi keuangan melalui pembukuan yang transparan dan akuntabel.
- e. Pendampingan terhadap pengelolaan pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK dan juga berjalannya program pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengelola unit usaha desa.

3. Tahapan ketiga

Pada tahapan ini dilakukan setelah pengabdian selesai, maka pengabdian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu hasil pembukuan yang dilakukan oleh BUMDes Karang Sari terhadap arus kas yang dikelolanya, sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pengabdian yang dilakukan dan dapat ditindaklanjuti untuk pengabdian berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pelatihan pembukuan keuangan ini memberikan ilmu yang berharga baik bagi peserta ataupun pemateri. Bagi peserta, mereka bisa berbagi pengalaman mengenai praktik pengelolaan BUMDes yang telah mereka lakukan, sedangkan bagi pemateri, ia dapat mengkaitkan pengalaman peserta dengan standar akuntansi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan dan juga peraturan kementerian yang berlaku. Adapun untuk keberlanjutan dari kegiatan ini peserta mengharapkan adanya pendampingan yang mendalam pada saat penyusunan laporan keuangan. Proses pelatihan pembukuan keuangan pada pembahasan ini disampaikan tentang pentingnya pengelolaan dana desa secara efisien, transparan dan akuntabel dalam sebuah pencatatan pembukuan keuangan yang dikelola oleh badan usaha milik desa agar dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada masyarakat. Sehingga BUMDes Karang Sari dapat memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara maksimal dengan adanya keterbukaan dan kejujuran pihak pengelolanya, serta dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat yang berdampak pada meningkatnya perekonomian warga desa Karang Sari. Adapun beberapa hal yang telah disampaikan kepada

pengelola BUMDes Karang Sari dalam pelatihan pembukuan keuangan ini yang mana juga menjadi hasil dari pengabdian ini adalah sebagai berikut

1. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Merujuk kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa [5] yaitu dalam mengelola sebuah lembaga keuangan desa haruslah menerapkan sistem transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut [6] uraian tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam melaksanakan tata kelola keuangan haruslah memenuhi beberapa syarat berikut :

- a. Transparan, yaitu suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan kemudahan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel, yaitu suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
haruslah mengikutsertakan semua kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- c. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Ketiga hal di atas haruslah terpenuhi dalam sebuah pengelolaan sistem keuangan desa, sebab dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi secara jelas mengenai tata Kelola keuangan yang beredar di desa mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap para pengelola dalam mengelola unit-unit usaha yang menjadi potensi desa, serta dapat berdampak pada peningkatan perekonomian desa secara global yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

2. Pelatihan Pembukuan dan Laporan Keuangan

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pembukuan keuangan pada BUMDes Karang Sari meliputi pembukuan keuangan sederhana, pencatatan arus kas, dan pembuatan laporan keuangan. Seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik, adapun rincian dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan adalah menyiapkan sarana, prasarana dan alat keperluan pelatihan seperti peralatan tulis, buku kas, dan materi pelatihan. Kemudian melakukan pelatihan melalui presentasi tentang pembukuan dan pembuatan laporan keuangan. Peserta dari pelaksanaan pelatihan ini adalah para pengelola BUMDes Karang Sari, beberapa perwakilan masyarakat dan juga jajaran structural desa. Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan pembukuan keuangan, yaitu (1) Motivasi dalam mengelola keuangan dengan kejujuran, amanah dan tanggung jawab. Tentunya hal tersebut dapat tercapai apabila pengelola dapat mengelola dana desa secara transparan, akuntabel dan juga dapat mempertanggung jawabkannya dalam bentuk laporan keuangan sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil usahanya (2) Metode pencatatan, pengelola melakukan pencatatan seluruh dana yang beredar didesa, mulai dari arus kas yang menjelaskan tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran uang, Neraca yang berfungsi menjelaskan nilai asset, kewajiban dan modal usaha pada suatu tanggal tertentu, serta laporan laba rugi. Dalam metode ini pengelola juga harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait aktivitas usaha yang telah dilakukannya ataupun yang menjadi bisa menjadi potensi desa yang

kemudian dapat dikelola dan di olah oleh masyarakat. (3) Latihan praktek pembukuan sederhana yang dilakukan oleh para peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan ini berlangsung dua arah dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab.

Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan pada suatu lembaga atau perusahaan dalam satu periode yang digunakan untuk menjelaskan sebuah hasil kinerja dari suatu lembaga tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh [7] tentang pelaporan keuangan yaitu sebuah struktur dan proses akuntansi yang menampilkan suatu informasi keuangan yang dilaporkan maupun disajikan guna mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Sedangkan dalam ranah keuangan publik, dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2004 [8] mengenai keuangan negara yang diharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Karena laporan keuangan merupakan sebuah hasil yang menunjukkan adanya rasa tanggungjawab terhadap sebuah pengelolaan keuangan. Pembukuan yang digunakan dalam usaha mikro menengah pada dasarnya hanya membutuhkan pembukuan yang sederhana sebab hal tersebut menjadi bagian kecil dari praktek akuntansi yang sebenarnya, yaitu pencatatan aliran uang kas yang didalamnya terdapat proses penerimaan atau pendapatan pengeluaran baik secara tunai maupun kredit [9]. Dalam hal ini BUMDes Karang Sari menjadi bagian daripada usaha mikro menengah yang dikelola oleh perangkat desa. Pembukuan pada dasarnya adalah perekaman atau pencatatan semua informasi mengenai transaksi dan kegiatan keuangan dari pebisnis tentang proses akuntansi mereka. Hasil dari proses akuntansi adalah berupa pelaporan keuangan atau pelaporan akuntansi sebagai bentuk informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan [10].

Perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi telah mendorong hampir semua lembaga atau kegiatan ekonomi untuk membuat sebuah laporan keuangan, baik itu dalam lingkup swasta maupun pemerintah. Laporan keuangan desa yang dikelola oleh BUMDes menjadi perhatian besar di kalangan publik saat ini, tidak terkecuali BUMDes Karang Sari di kecamatan Pejajaran. Hal tersebut dikarenakan adanya kemandirian ekonomi yang diberikan dan dipercayakan oleh pemerintah pusat kepada desa, dengan begitu membuat para pemerintah desa harus membuat laporan keuangan sebaik-baiknya untuk dapat dilaporkan kepada pemerintah ataupun masyarakat setempat. Adapun untuk standar dalam pengelolaan keuangan desa yang digunakan pada BUMDes Karang Sari dan juga sebagaimana badan usaha lainnya, menerapkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dalam pembuatan laporan keuangannya. Menurut [11] tentang komponen pelaporan yang terdapat dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Sebab dalam laporan tersebut tersedia:
 - a. Informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 - b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
2. Neraca (*Balance Sheet*) merupakan sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan modal perusahaan periode tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan asset tetap serta mengklasifikasikan

kewajibannya yang menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan yang dikelola BUMDes.

3. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*) ialah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki BUMDes sampai dengan akhir periode.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to The Financial Statement*) merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan seperti yang tersebut di atas dapat dikatakan sebagai “laporan-laporan untuk tujuan umum”.

Tabel 1. Hasil Pengabdian

No	Indikator	Sebelum pelatihan	Setelah pelatihan
1	Pengetahuan pembuatan pembukuan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan	Belum memperoleh pengetahuan pembukuan keuangan sesuai SAK, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas karena pencatatan masih seadanya yang tidak transparan dan akuntabel serta sering menimbulkan ketidakpercayaan public	Bertambahnya pengetahuan tentang pembukuan keuangan sesuai SAK dan juga dapat mempertanggungjawabkan secara baik kepada public, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes Karang Sari.
2	Pengetahuan pencatatan arus kas desa	Belum memperoleh pengetahuan tentang pencatatan arus kas desa secara efisien	Bertambahnya pengetahuan tentang pencatatan arus kas desa sehingga meningkatkan efisiensi alokasi dana desa Karang Sari dalam penganggaran alokasi dana yang digunakannya.
3	Pengetahuan pembuatan laporan keuangan	Belum memperoleh pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan, sehingga membuat seluruh proses administrasi kurang lancar dan merumitkan pengelolaan keuangan setiap usaha	Bertambahnya pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan, sehingga dapat mengoptimalkan segala proses administrasi dan juga memudahkan pengelolaan keuangan atas setiap usaha yang dikelola oleh BUMDes Karang Sari

Pencatatan laporan keuangan yang sistematis memiliki manfaat-manfaat, yaitu dapat memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan sebuah usaha, dapat memberikan informasi keuangan mengenai hasil dari sebuah usaha dalam satu periode, dapat memberikan informasi yang dapat membantu pihak berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi suatu usaha serta dapat memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan pihak yang berkepentingan lainnya [12]. Melalui transparansi laporan keuangan BUMDes ini diharapkan agar semua elemen masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Informasi keuangan bertujuan memberikan informasi kepada publik serta memberikan informasi yang berguna dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan sebagai bentuk

pertanggungjawaban. Selain itu, diharapkan juga untuk mengontrol kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh BUMDes.

Melihat kondisi masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Karangasari antara sebelum dilaksanakan pengabdian masyarakat ini dan juga setelahnya dapat dilihat pada table berikut ini, yang mana ini juga menggambarkan akan hasil pengabdian masyarakat secara keseluruhan yang sesuai dengan target, yaitu masyarakat dan juga pengelola BUMDes Karangasari yang telah mengikuti pelatihan pembukuan keuangan ini telah mampu melakukan pembukuan keuangan sederhana secara efisien.

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa pelaksanaan pelatihan pembukuan keuangan yang telah dilaksanakan bersama pengelola BUMDes Karangasari dapat disimpulkan sesuai dengan target dan tujuan. Setelah mengikuti pelatihan ini pengelola BUMDes Karangasari mampu membuat pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada public secara transparan dan akuntabel. Kemudian pengelola BUMDes juga mampu melakukan pencatatan arus kas desa secara efisien sehingga dapat mengetahui seberapa besar keuntungan usaha, mengatur arus kas dan dapat memprediksi bagaimana peningkatan usaha di waktu yang akan datang. Selain itu pengelola BUMDes juga mampu dalam membuat laporan keuangan yang dapat mengoptimalkan segala proses administrasi pada BUMDes Karangasari.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan melalui pelatihan pembukuan keuangan terhadap pengelola BUMDes Karangasari dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pihak jajaran perangkat desa. Hal tersebut didukung dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola keuangan seperti halnya praktik pembukuan keuangan yang sesuai standar akuntansi, pencatatan arus kas, dan pembuatan laporan secara transparan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Pengelolaan BUMDes yang tidak transparan dapat mengakibatkan sistem tata kelola yang tidak efektif dan efisien, sehingga menjadikan kegiatannya tidak aktif dan juga mengakibatkan dana BUMDes menjadi tidak terserap secara maksimal oleh masyarakat atau SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Padahal masyarakat masih bisa terbantuan dengan anggaran tersebut sehingga bisa merasakan kehadiran BUMDes. Dengan optimalnya pengelolaan BUMDes Karangasari dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menambah kepercayaan masyarakat kepada seluruh jajaran perangkat desa khususnya pengelola BUMDes. Masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pihak jajaran desa dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakatnya, dan diharapkan dapat lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh desa Karangasari, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih diberikan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat yang telah membantu pengabdian dalam melakukan pengabdian dengan memberikan pendanaan melalui SK Nomor: 87/A.3-RA/LPM/II/2022, dengan hal tersebut pengabdian masyarakat ini bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, ucapan terimakasih juga diberikan kepada

seluruh tim pengabdian termasuk warga masyarakat yang menjadi objek pengabdian yang telah mendukung dalam mensukseskan pengabdian ini dengan lancar. Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Daftar Pustaka

- [1] Furqaini, A. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-anget Kabupaten Sumenep)". Hasil Tesis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2009.
- [2] Hidayat, dkk. "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Jayagiri", 2018.
- [3] Suryanto. Rudy. "Peta Jalan BUMDes Sukses", PT.Syncore Indonesia, 2018.
- [4] Meleong, L. J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [5] Permendagri Nomor 113. "Tentang pengelolaan keuangan desa", 2014.
- [6] Kurnia, dadang. "Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". Jakarta: BPKP, 2015
- [7] Suwarjono. "Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan". Yogyakarta: Cetakan Kedua BPFE, 2006.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. "Tentang Keuangan Negara". Jakarta: Tamita Utama, 2004.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia. "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil menengah", 2016.
- [10] Haryono, Y.A. "Dasar-dasar Akuntansi". Yogyakarta: Cetakan 1, STIE YKPN, 2011.
- [11] Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: Cetakan Ke-empat, CV Andi Offset, 2009.
- [12] Rinvai, V. "Commerical Bank Management: Manajemen Perbankan dan Teori ke Praktik". Jakarta: Cetakan 1, Rajawali Pers, 2013.